

PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM MANAJEMEN APARATUR RESPONSIF DAN TERPADU (SMART) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh : Yahdili Rohman

yahdilirohman@riau.go.id

Pembimbing: Abdul Sadad S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.

0761-63277

Abstract

SMART is the implementation of e-Government in improving service in the field of staffing within the Riau Provincial Government. The purpose of this study is to find out and analyze the application of the Integrated and Responsive (SMART) Apparatus Management System at the Riau Province Regional Personnel Agency. The theoretical concept used is E-Government Implementation that uses the Rianto & Lestari theory with indicators of Hardware and Software, Data and Information, HR and Attitude, and Communication. This study uses qualitative research methods with descriptive. Data collection about this program researchers used observation, interview and documentation techniques. In selecting informants as sources of information researchers used the Snowball Sampling technique. In the implementation of E-Government through SMART at the Riau Province Regional Personnel Agency the situation in the field shows that there are still many civil servants who still do not know the mechanism and workflow from SMART, limited infrastructure and SMART have not been connected with BKN's application. The results of the study show that the implementation of E-Government has been carried out as well as possible but in the implementation phase can not be separated from the factors that influence in the form of facilities and infrastructure, socialization and availability of legal basis.

Keywords : Implementation, E-Government, SMART.

PENDAHULUAN

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan good governance adalah dengan berupaya melakukan reformasi di segala kegiatan pemerintahan salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi (e-government). E-Government di Indonesia, mulai diterapkan dan diperkenalkan pada tanggal 24 April Tahun 2001 melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), Inpres ini menjelaskan bahwa Aparatur Pemerintah harus menggunakan teknologi informasi dan telematika dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi

E-Government adalah bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Implementasi e-Government dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana seperti penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (transparency) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Bentuk layanan sederhana lainnya, e-Government dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi baik intern di kalangan Perangkat Daerah (PD) maupun komunikasi interaktif dengan masyarakat melalui media e-mail, chatting atau teleconference.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan implementasi e-Government dalam pelayanan bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. Sistem ini

mengalami pengembangan dari pengolahan data generasi pertama yang dilakukan hanya dengan menggunakan Microsoft Excel menjadi pengolahan data generasi kedua, dengan menggunakan aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang berbasis desktop.

Pengembangan sistem selanjutnya yaitu pengolahan data generasi ketiga berbasis web service yang diberi nama Sistem Manajemen Aparatur yang Responsif dan Terpadu yang disingkat menjadi SMART. Sistem ini dikembangkan di Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau selain menyajikan informasi yang terkait dengan kepegawaian, juga dikhususkan untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian.

Sistem Manajemen Aparatur yang Responsif dan Terpadu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada instansi tersebut. Permasalahan yang ada diantaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang status kepegawaiannya tidak jelas, ASN yang sudah pensiun, meninggal atau berhenti data kepegawaiannya tidak diperbaharui, data ASN tidak terbarukan sehingga jumlah ASN tidak diketahui secara pasti dan data yang ada saling berbeda serta pemutakhiran data tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan diterapkannya SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau diharapkan semua permasalahan yang terjadi dapat diatasi.

Pada saat sekarang ini, dengan pengembangan SMART yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan BKN Award tahun 2018 dalam Pengelolaan Kepegawaian Terbaik kategori provinsi (sumber : <https://bkd.riau.go.id/post/166/> provinsi-riau-terima-penghargaan-bkn-award).

Dengan melihat hal tersebut, pada akhirnya timbul fenomena yang ada yaitu :

1. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih ada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang masih ada yang belum mengetahui mekanisme dan alur kerja serta sama sekali tidak mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi SMART.
2. Pemerintah Provinsi Riau mengalami keterbatasan anggaran dalam pengembangan infrastruktur SMART.
3. Aplikasi SMART Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada saat sekarang ini masih belum terkoneksi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik Badan Kepegawaian Negara sehingga tidak terintegrasi dengan data pemerintah pusat.

Oleh karena itu, untuk mengetahui yang Pemerintah Provinsi Riau lakukan dalam menerapkan teknologi informasi (e-government) melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, maka diperlukan kajian tentang apa saja usaha-usaha pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah yang menangani pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam menerapkan e-Government melalui sistem yang diberi nama Sistem Manajemen Aparatur yang Responsif dan Terpadu (SMART). Hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dari e-Government, yaitu suatu organisasi, program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu : **Penerapan E-Government Melalui Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.**

A. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Government melalui Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan e-Government melalui Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam ilmu administrasi publik sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Di mana dengan penelitian ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan informasi atau sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan e-Government melalui Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Serta diharapkan agar para Aparatur Sipil Negara khususnya Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan kebijakan penerapan e-Government melalui Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu dan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi perkembangan pemerintah Provinsi Riau.

METODE

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber data yaitu dengan cara menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Analisa data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu selain melalui wawancara dan observasi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, peneliti menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti kemudian data-data tersebut dijabarkan secara deskriptif sesuai dengan kenyataan penerapan e-Government melalui SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

HASIL PENELITIAN

A. Aspek-aspek Penerapan E-Government melalui Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Proses peninjauan penerapan e-Government pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau peneliti mengklasifikasikan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Rianto dan Tri Lestari menjadi empat aspek, yakni Hardware dan Software, Data dan Informasi, SDM dan Sikap Pelaksana, dan Komunikasi.

1. Hardware dan Software (Perangkat Keras dan Perangkat Lunak)

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan jaringan berbasis teknologi internet yang dapat menghubungkan antar instansi pemerintah,

pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat serta menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat global yang memungkinkan mekanisme komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan koordinasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akhir – akhir ini teknologi informasi telah berkembang cukup maju. Komputer satu dengan lainnya dapat dihubungkan dengan jarak yang berjauhan sehingga memungkinkan proses komunikasi secara interaktif.

Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berfungsi dalam pengelolaan informasi kepegawaian yang saling terkoneksi menggunakan jaringan internet. Kebutuhan minimal untuk mengakses Aplikasi ini adalah PC/ Notebook/Netbook/HP yang terkoneksi ke jaringan internet dengan dukungan LAN atau WLAN (*wifi*). Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terkoneksi langsung dengan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Aplikasi SMART dapat diakses menggunakan software penjelajah internet (*browser*) seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explore dan lain-lain.

Selanjutnya hal yang tidak kalah penting lainnya terkait dengan hardware dan software dalam penyelenggaraan e-government melalui SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah alokasi anggaran dalam pemenuhan Hardware dan Software untuk pengelolaan SMART. Sistem aplikasi ini di tunjang oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau. Dalam penyusunan anggaran dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SMART tersebut.

Anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem informasi

pengelolaan data yang terpadu dalam hal ini SMART dapat berubah dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, tapi untuk saat ini penganggaran hardware dan software pendukung penerapan e-government sudah dilakukan dengan baik.

2. Data dan informasi

Komponen sumber daya berikutnya adalah data dan informasi. Sumber daya ini sering kali kurang mendapatkan perhatian oleh implementor e-Government. padahal kesediaan data masukan, baik dalam bentuk lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (database) menjadi bahan utama proses e-Government guna mendukung tujuan penyebaran informasi. Terselenggaranya aplikasi sistem informasi atau sistem pengolahan data yang terpadu guna mendukung penyebaran informasi sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas publik.

SMART merupakan sarana bagi Pegawai Negeri Sipil dalam memperoleh data dan informasi kepegawaian melalui media yang mudah diakses dan terpadu dengan seluruh SKPD dan unit-unit kerja Pemerintah Provinsi Riau. Kehadiran SMART akan memberikan kesempatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan updating data kepegawaian dan mengecek status kepegawaiannya serta aplikasi ini juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi kepegawaian lainnya.

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang memberikan kemudahan dalam implementasi sistem manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Aplikasi SMART berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian, pelayanan front office di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, database kepegawaian, dokumen elektronik kepegawaian, Sasaran Kerja

Pegawai (e-kinerja) dan hasil Assessment pegawai (pool talent)

Dalam penyelenggaraan SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan data dan informasinya menggunakan database dalam menyimpan serta mengelola data informasinya sehingga data yang ada saling terpadu antara satu sistem aplikasi dan aplikasi lainnya. database ialah tempat penyimpanan data dikomputer yang dikelola oleh admin SMART. Informasi-informasi yang ada dalam database SMART terdiri dari data-data umum seluruh Pegawai Negeri Sipil yang meliputi profil setiap PNS yang terdiri dari data keterangan individu, data riwayat pangkat, data riwayat jabatan, data pendidikan formal, data Diklat Struktural, data Diklat fungsional, data Diklat Teknis lainnya, data tanda jasa penghargaan yang telah diterima, data riwayat organisasi, dan data keluarga serta data terkait hasil assessment PNS yang bersangkutan.

Dalam penyebaran data dan informasi pengelola SMART hanya menyebarkan informasi seputar statistik dan data nominatif jumlah pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, hal ini dikarenakan tidak semua data dapat disebarluaskan oleh SMART. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa penyebaran data informasi harus memiliki tujuan dalam penggunaannya, dan terdapat informasi yang dikecualikan yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi maka dari itu diperlukan pengajuan yang jelas dari pemohon untuk meminta data yang terdapat di SMART

SMART merupakan aplikasi pelayanan publik yang mampu memberikan kemudahan akses data dan informasi kepegawaian bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan teknologi informasi pekerjaan layanan publik dapat

diotomatisasi, prosedurnya standar, konsisten, cepat dan tepat, pencatatan administrasi pelayanan dan mekanisme pelaporan dapat dilakukan lebih tertib sehingga menjangkau kelancaran proses pelayanan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sikap Pelaksana

SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Ketersediaan SDM yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi programmer administrator jaringan, operator dan tenaga lainnya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya harus cukup. bahkan komputer memberi sumbangan keberhasilan yang cukup signifikan.

Kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) relatif mudah untuk dipenuhi, tetapi untuk menyiapkan SDM yang peduli terhadap perubahan merupakan pekerjaan besar. Mewacanakan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar. Sikap dan perilaku yang sudah terpolakan selama bertahun-tahun tentu tidak cukup untuk dirubah dalam waktu sekejap, melainkan memerlukan waktu atau proses dan rekayasa sosial yang mampu menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.

Sumber daya Manusia yang disiapkan sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang seharusnya. Sumber daya Manusia yang dibutuhkan adalah yang ahli dibidang informatika, namun terlepas dari latar belakang pendidikan SDM yang disediakan untuk mengelola SMART merupakan orang-orang yang terpilih dan memenuhi kriteria serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Setiap pegawai pun dibekali dan diberikan pelatihan agar dapat mengaplikasikan Sistem Manajemen

Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART).

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang ada pada individu. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh suatu organisasi. Begitu juga dengan sumber daya manusia terhadap pengelolaan SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Keberhasilan dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap individu dari setiap pelaksana tersebut

Terkait dengan sikap pelaksana dari Sumber Daya Manusia dalam penerapan e-government pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik oleh para pelaksananya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif, karena terkait dengan motivasi, kemauan atau niat. Kadang-kadang respon itu muncul dalam bentuk sikap proaktif tetapi ada pula yang bersifat resistensi. Ada tidaknya respon pelaksana ini dapat dilihat dari aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan kebijakan e-government secara konsisten maka respon positif. Instansi atau personel lainnya yang diposisikan sebagai pelanggan, dapat diukur tingkat kepuasannya terhadap produk-produk e-government.

Pengelola Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk kemampuan dan sikap pelaksananya sangat menentukan dari suatu keberhasilan dalam ketercapaian organisasi, dan sumber daya manusia yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sudah mampu untuk menjalankan masing-masing tugasnya dengan baik, karena sudah mengikuti pelatihan secara terfokus terhadap masing-masing tugas yang mereka kerjakan.

4. Komunikasi

Kebijakan e-Government adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi

dalam implementasinya tersebar di seluruh komponen lembaga pemerintah termasuk institusi-institusi di daerah. Antara pemerintah pusat dengan birokrasi di daerah sebagai pelaksana tentunya harus mempunyai persepsi yang sama. Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di daerah berkewajiban mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan e-Government. Proses komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan dan penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, pelatihan atau bentuk pertemuan lainnya. Tujuannya adalah membangun perspektif yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaannya.

Mekanisme komunikasi dan koordinasi yang terjadi dalam penggunaan aplikasi SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terkait cara penggunaan Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu.

Sejak awal penerapan SMART pada tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah melakukan 3 (tiga) kali sosialisasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Riau. Sedangkan pada saat ini untuk komunikasi dan koordinasi yang terjadi dalam penggunaan aplikasi SMART adalah pengguna dapat datang ke Badan Kepegawaian Daerah ataupun berkomunikasi melalui surat,

Proses komunikasi dapat dikatakan berhasil mana kala para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman bidang e-Government. Terkait komunikasi yang telah dilakukan dalam penerapan aplikasi SMART dengan partisipasi Pegawai Negeri Sipil sudah dapat dikatakan baik, hal ini karena sosialisasi terkait SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada saat sekarang ini telah dijelaskan bahwa

SMART dijadikan sebagai database seluruh sistem yang berkaitan dengan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Komunikasi yang dilakukan sudah cukup memadai yaitu dengan berkordinasi dengan setiap SKPD terkait pengelolaan data kepegawaian yang dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi penggunaan SMART. Bukan hanya itu sosialisasi kerap dilakukan kepada admin yang terdapat pada masing-masing SKPD meskipun masih kurang maksimal

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-Government melalui SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Dengan diterapkannya suatu kebijakan pasti ada factor-faktor yang mempengaruhinya baik itu yang menjadi kendala ataupun faktor pendukung dalam pelaksanaannya begitu juga dengan penerapan SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan E-Government melalui SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) memiliki kelebihan dari segi kemampuan pengolahan data jika dibandingkan dengan pengelolaan data secara manual.

Kendati demikian sistem ini juga memiliki kelebihan karena didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Apalagi penggunaan komputer dan internet sangat sensitif serta dapat mengalami gangguan kapan saja apabila

tidak disertai dengan perangkat yang memadai. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penerapan SMART di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Kesiapan perangkat elektronik baik perangkat keras maupun lunak dalam mendukung penerapan SMART yang ada sudah cukup baik, namun yang perlu di tingkatkan adalah manajemen dalam pengelolaannya.

2. Sosialisasi

Proses sosialisasi tercipta berasal dari interaksi sosial, dan interaksi sosial tercipta dari komunikasi yang berjalan lancar agar dapat menciptakan sosialisasi yang maksimal. Proses komunikasi mendukung dan menjadi faktor utama terjadinya suatu sosialisasi di dalam masyarakat. Karena tanpa adanya komunikasi proses sosialisasi di dalam masyarakat tidak akan berlangsung

Sosialisasi yang dilakukan terkait dengan penerapan e-government melalui SMART kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masih belum maksimal, sehingga masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang belum mengetahui bagaimana mekanisme dan alur kerja SMART, serta masih belum mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi SMART ini.

3. Ketersediaan Dasar Hukum

Yang mendasari penerapan e-Government melalui SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tingkat pusat adalah dimulai dari UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelimpahan wewenang seluas-luasnya dari pusat kepada daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dasar hukum lainnya yang berada ditingkat pusat

yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Dasar hukum selanjutnya, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional diperlukan sistem informasi manajemen kepegawaian yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah. Adapun peraturan yang bersifat umum yang saat ini memayungi pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Electronic Government (E-Government) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa ketersediaan dasar hukum yang dijadikan acuan untuk membangun SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, pada tingkat pusat cukup memadai namun Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau belum mengeluarkan peraturan, Keputusan Gubernur ataupun Petunjuk Teknis atau Standar Operasional Prosedur yang secara khusus mengatur dalam pengelolaan Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) tersebut.

Dengan demikian dapat dilihat dasar hukum dalam penerapan e-Government melalui SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau ada di tingkat pusat, tetapi peraturan terkait petunjuk teknis yang secara khusus membahas tentang Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) ditingkat daerah belum ada, acuan hukum pengelolaan SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau masih mengacu kepada Peraturan

Gubernur Riau Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Electronic Government (E-Government) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kesimpulan

1. Bahwa penerapan E-Government melalui Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau diukur dengan aspek-aspek penerapan yang dikemukakan oleh Rianto dan Tri Lestari yang terdiri dari Hardware, Software, Human Resources (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana. aspek-aspek penerapan yang dikemukakan oleh Rianto dan Tri Lestari yang terdiri dari Hardware, Software, Human Resources (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana; Hal ini terbukti dengan terpenuhinya indikator tersebut di atas, saat ini penerapan pengelolaan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sudah cukup baik dengan diterapkannya E-Government melalui SMART ini. Penerapan E-Government pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau lebih mudah di akses oleh Pegawai Negeri Sipil karena sudah terhubung melalui teknologi jaringan internet sehingga menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan dengan manual. Pegawai saat ini sudah dapat mengecek data dan status kepegawaian yang terintegrasi dan terpadu antara satu sistem dan sistem lainnya.
2. Bahwa dalam mewujudkan penerapan E-Government pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, sarana dan prasarana, sosialisasi serta ketersediaan dasar hukum. Faktor-faktor tersebutlah yang menunjang penerapan SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau,

dalam hal kelengkapan sarannya sendiri sudah cukup memadai dimana ketersediaan komputer, server, printer dan perangkat penunjang lainnya sudah tersedia dengan baik, secara sarana juga adanya fasilitas internet yang sudah cukup besar untuk menampung Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART), namun tahap sosialisasi masih belum maksimal dalam penyampaian informasi terkait dengan penerapan SMART. Jika dilihat dari faktor ketersediaan dasar hukumnya, peraturan terkait petunjuk teknis yang secara khusus membahas tentang Sistem Manajemen Aparatur Responsif dan Terpadu (SMART) ditingkat daerah masih belum ada.

Saran

1. Untuk menciptakan penerapan e-government melalui SMART pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau maka perlu mempersiapkan sumber daya yang baik, mulai dari SDM yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, proses perencanaan penganggaran yang tepat guna, ketersediaan dasar hukum serta perlu meningkatkan manajemen pengelolaan untuk kelancaran penerapan SMART.
2. Dalam hal ini diharapkan kepada pengelola SMART untuk meningkatkan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar penerapan SMART dapat diketahui dan menyebar secara merata, sehingga meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan data kepegawaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. (2009). Teknologi Informasi Administrasi, Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, Jhon. W. (2002). Research Design (desain penelitian pendekatan kualitatif dan kuantitatif). Jakarta: KIK Pres.

- Gordon, B. Davis. (1999). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Henry, Simamora. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ke-3. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). Membangun Aplikasi E-Government. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Indrajit, Richardus Eko. (2004). E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.
- Indrajit, Richardus Eko. (2006). Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.
- Janet, Caldow. (2001). Intitute for Electronic Government. UK: IBM Corporation.
- McLeod, Raymond., & Schell, George. (2004). Sistem Informasi Manajemen Edisi ke-8. Jakarta: PT. Indeks.
- Moleong, J. Lexy. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi. (2009). Manajemen Strategik Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Mohammad. (2003). Metode Penelitian. Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prasojo, Eko., Teguh, Kurniawan., & Defny, Holidin. (2007). State Reform in Indonesia. Depok : Administrative Science Department, University of Indonesia.
- Rianto, Budi., & Lestari, Tri. (2012). Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, Tata. (2005). Sistem Informasi Manajemen, Edisi I. Yogyakarta: Andi.
- Terry, George R. (2003). Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Internet :

<http://www.worldbank.org>

<http://www.bkd.riau.go.id>

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangann e-Government

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Gubernur Riau Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Electronic Government (E-Govenrment) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau Nomor :
Kpts. 138/BKD/1.1/II/2017 tentang
Pengesahan Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau Tahun 2018